

ABSTRACT

Social changes followed by political developments that occurred in Indonesia gave new hope regarding the existence of indigenous peoples and their rights. Not only the recognition of their identity as indigenous peoples but also related to the territory that is part of tradition inheritance in society for generations. However, government policies at the field level in the field have not been maximized, especially the presence of farmers who live directly adjacent to the state forest area, the National Park.

This study describes the dynamics of the contestation between the government and the struggle of the farmers community along with their customary identity on land tenure. Referring to Foucault's theory, the power associated with the concept of space production from Levebre caused the limitations of the community to access natural resources both in terms of control, management and utilization, based on community traditions in the Lore Lindu National Park area. Using qualitative methods by understanding the phenomena that have been experienced by the community related to behavior, perception, motivation and actions naturally, faced with regulations to regulate the area of the National Park in the Village Moa Kulawi Selatan District, Sigi Regency, Central Sulawesi.

The results found that pressure on policies and a sense of trauma about incidents in the regional bring changes to the mindset of the community. Affirmation regarding the status of the area is clearly illustrated in the form of a map and evidenced by the existence of a permanent boundary marking. In terms of action there are community doubts to manage the area that was previously processed, because land claims have entered the National Park area. Various pressures have led to actions and efforts to restore the area to the community. The basis of the struggle to place historical and customary aspects as an argument to gain state recognition of the Moa community. Meanwhile, the government continues to carry out its duties in accordance with policies regulated by understanding conservation for environmental conservation.

Keywords: Land Mastery, Forest, Farmer Community

INTISARI

Perubahan sosial menyusul dengan perkembangan politik yang terjadi di negara Indonesia memberikan harapan baru mengenai eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya. Tidak hanya pengakuan akan identitas mereka sebagai masyarakat adat tetapi juga berkaitan dengan wilayah kekuasaan yang menjadi bagian dari sumber warisan kehidupan tradisi masyarakat secara turun temurun. Namun, kebijakan pemerintah dalam tataran praksis dilapangan belumlah maksimal, terutama kehadiran masyarakat petani yang tinggal berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara yaitu Taman Nasional.

Penelitian ini mendeskripsikan dinamika kontestasi antara pemerintah dan perjuangan masyarakat petani bersama identitas adatnya terhadap penguasaan lahan. Merujuk pada teori Faucoult yaitu kekuasaan yang dikaitkan dengan konsep mengenai produksi ruang dari Levebre meyebabkan keterbatasan masyarakat untuk mengakses sumber daya alam baik penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan berdasarkan tradisi masyarakat dikawasan Taman Nasional Lore Lindu. Menggunakan metode kualitatif dengan cara memahami fenomena dilapangan yang dialami oleh subjek penelitian yaitu masyarakat dari perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara alamiah, diperhadapkan dengan regulasi untuk mengatur wilayah Kawasan Taman Nasional di Desa Moa Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

Hasil yang didapatkan dari penelitian dilapangan bahwa tekanan akan kebijakan dan rasa trauma akan kejadian dikawasan membawa perubahan pada pola pikir masyarakat. Penegasan mengenai status kawasan secara nyata digambarkan dalam bentuk peta dan dibuktikan dengan adanya patok tapal batas permanen. Dari sisi tindakan ada keragu-raguan masyarakat untuk mengelolah kawasan yang sebelumnya pernah di olah, karena klaim tanah yang telah masuk di wilayah kawasan Taman Nasional. Berbagai tekanan menyebabkan tindakan serta upaya untuk mengembalikan wilayah dilakukan oleh masyarakat. Basis perjuangan meletakkan aspek historis dan adat sebagai argumen untuk mendapatkan pengakuan negara akan wilayah masyarakat Moa. Sedangkan, pemerintah tetap menjalankan tugas sesuai kebijakan yang diatur dengan paham konservasi guna pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Penguasaan Lahan, Hutan, Masyarakat Petani